BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (bank bjb) adalah bank yang pendiriannya dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Namun seiring perkembangannya bank ini berubah bentuk hukum nya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi perseroan Terbatas (PT). Bank yang sebelumnya mempunyai call name bank jabar banten ini kini berubah dengan call name baru yaitu bank bjb.

Dalam pemenuhan layanan jasa terhadap masyarakat, bank bjb memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam proses pembayaran pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui kantor pos maupun bank yang ditunjuk oleh Dirjen pajak. Salah satu nya pembayaran pajak ini dapat dilakukan di bank bjb. Bank bjb memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembayaran pajak. Layanan pembayaran pajak tersebut antara lain pembayaran pajak pertambahan nilai (ppn), pajak penghasilan (pph), pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan jenis pajak lainya. Pembayaran ini

menggunakan sistem informasi sehingga hasil yang di dapat akan lebih baik, efisien dan efektif dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya.

Beberapa kendala yang menghambat proses pembayaran pajak ini antara lain tidak terdaftarnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sistem, sehingga NPWP tidak masuk dalam sistem serta adanya perbedaan data identitas wajib pajak yang ada pada sistem dengan identitas yang tertulis pada lembar Surat Setoran Pajak (SSP) misalnya pindah alamat atau kode akun pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui gambaran sistem informasi yang berjalan dalam perusahaan dan membuat analisis gambaran sistem tersebut.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Masih terdapat kendala pada saat memasukkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pada sistem.
2. Masih terdapat kendala pada sistem yang disebabkan adanya perbedaan identitas wajib pajak yang tertera pada SSP (Surat Setoran Pajak) dengan yang ada pada sistem.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembayaran pajak yang berjalan pada bank bjb (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk)
2. Bagaimana gambaran analisis sistem pembayaran pajak pada bank bjb (PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten, Tbk)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Praktek Kerja Lapangan adalah untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang sesungguhnya dilapangan, sedangkan tujuan dilaksanakannya kerja praktek adalah untuk :

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran pajak yang sedang berjalan pada bank bjb (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk)
2. Untuk mengetahui gambaran analisis sistem pembayaran pajak yang berjalan pada bank bjb (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk)

1.4. Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

Lokasi kerja Praktek : Bank bjb (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk)

Alamat perusahaan : Jl. Braga no 12 Bandung

Tabel 1.1.

Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

No	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan					
		April	Juli				Agustus
			1	2	3	4	1
1	Pengajuan kerja praktek						
2	Mulai kerja praktek						
3	Melakukan pengelolaan kas setoran pajak						
4	Merekon jurnal pajak dan pengklasifikasian pajak						
5	Pengelolaan kas setoran pajak, input data, rekap mingguan						
6.	Pengelolaan kas, menghitung jumlah pembayaran pajak, akhir kerja praktek						